

Implementasi Kebijakan Pendidikan (Hakikat, Pendekatan, Strategi, Model, Tahapan, dan Faktor yang Memengaruhi)

Iwan Sanusi¹, Ade Een Khaeruniah², Siti Aini Latifah Awaliyah³

¹ Universitas Islam Bandung

² Kantor Kementerian Agama Kab. Bandung

³ Universitas Jendral Achmad Yani

*iwan.sanusi@unisba.ac.id¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara teoretis tentang konsep implementasi kebijakan dalam pendidikan, sebab tanpa memahami konsep dan teori pada tataran praktis akan sulit meraih tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, dan fenomena yang terjadi antara harapan dan kenyataan bertolak belakang. Studi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berpedoman pada studi kepustakaan. Hasil penelitian yaitu, untuk mencapai *success of goal* implementasi kebijakan dalam pendidikan hendaknya memperhatikan dan memahami konsep dan makna implementasi kebijakan, pendekatan, strategi, model, tahapan proses, kriteria pengukuran, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan dalam pendidikan.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Pendidikan*

ABSTRACT

This study aims to find out theoretically about the concept of policy implementation in education, because without understanding the concepts and theories at a practical level it will be difficult to achieve the stated policy goals, and the phenomena that occur between expectations and reality are contradictory. This research study uses a qualitative approach based on the literature study. The results of the research are, to achieve the success of the goal of implementing policies in education, it is necessary to pay attention to and understand the concept and meaning of policy implementation, approaches, strategies, models, stages of the process, measurement criteria, and the factors that influence the success of policies in education.

Keywords: *Implementation, Policy, Education*

1. Pendahuluan

Dalam teori manajemen kita mengenal model POAC (Plan, Organize, Act, and Control) yang dicetuskan oleh G. Terry. Salah satu poin penting dari kebijakan adalah implementasi atau penegakan hukum. Langkah panjang dalam proses pengembangan kebijakan bermuara pada implementasi kebijakan itu sendiri. Padahal, proses implementasi kebijakan merupakan penentu akhir terpenting dari seluruh pengembangan kebijakan, termasuk di bidang pendidikan. Artinya, sebaik apapun kebijakan dan program yang dikembangkan,

akan menjadi tidak berarti jika tidak diimplementasikan ke dalam proses implementasi. Oleh karena itu, sesederhana apapun, tidak boleh dikatakan buruk atau jelek, perumusan dan perumusan kebijakan, jika dilaksanakan akan menghasilkan nilai yang bermanfaat.

Pakar pertama yang menarik perhatian dan mengajukan gagasan untuk masalah implementasi adalah Douglas R. Bunker pada forum American Association for the Advancement of Science tahun 1970 (Akib dan Tarigan, 2008: Bowman dalam Rabin, 2001: 209). Eugene Bardach mengakui pemaparan konseptual pertama proses implementasi kebijakan sebagai fenomena sosial atau permainan politik sebagaimana biasa disebut, dan merupakan era pertama penelitian implementasi kebijakan dalam Forum (Birkland, 2001 :178). Konsep implementasi semakin banyak dibicarakan seiring dengan banyaknya para ahli yang mengembangkan gagasan mengenai implementasi kebijakan sebagai tahapan proses kebijakan. Wahab (1991:117) dan beberapa penulis menempatkan tahapan implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu dibarengi dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahapan yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan ini diperkuat oleh fakta bahwa tanpa penegakan hukum yang efektif, keputusan para pengambil kebijakan tidak akan berhasil diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang terlihat setelah adanya arahan efektif dari suatu kebijakan dan mencakup upaya mengelola masukan untuk menghasilkan keluaran atau outcome sosial.

Dalam bidang pendidikan, implementasi kebijakan merupakan hal yang terpenting. Sebagus apapun sistem pendidikan, sebaik apapun pemikirannya, percuma jika tidak dilaksanakan. Dari fenomenologi sistem pendidikan, tidak banyak konsep kebijakan yang diidealkan, namun dalam kenyataan di lapangan, khususnya pada satuan pendidikan, tidak sesuai dengan konsep rumusan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, studi tertulis ini akan mencoba memberikan gambaran teoritis dan praktis tentang bagaimana implementasi kebijakan pendidikan dilakukan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian kepustakaan, dengan objek utama adalah buku-buku dan dokumen-dokumen lain. Sebagai penelitian kepustakaan, metode pengumpulan data penelitian berupa data perpustakaan khususnya buku-buku yang berkaitan dengan “Implementasi Kebijakan Pendidikan”. Data yang terkumpul kemudian diseleksi, disajikan, dianalisis dan diolah agar ringkas dan sistematis. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi, yaitu analisis ilmiah terhadap kandungan informasi data (Muhadjir, 1998).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan Hakikat Implementasi Kebijakan Pendidikan

Secara etimologis kata “implement” berasal dari Kamus Merriam-Webster yang

berarti melaksanakan, yang berarti menyediakan sarana untuk memenuhi beberapa hal. Implementasi kebijakan merupakan tahapan praktis, berbeda dengan perumusan masalah atau perumusan kebijakan yang merupakan tahapan teoritis (Muhammad Jumhadi dan Warijo, 2008). Mengenai pengertian implementasi kebijakan, dapat merujuk pada pendapat para ahli, diantaranya Anderson (2006) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah penerapan mekanisme administrasi pemerintahan terhadap permasalahan. Grindle (1980: 7) menyatakan bahwa implementasi adalah suatu proses umum tindakan administratif yang dapat dipelajari pada tataran program tertentu. Menurut Wibawa dkk. (1994: 15), implementasi kebijakan merupakan upaya kolektif antara pemerintah dan sektor swasta, yang melibatkan tindakan individu maupun kelompok, yang semuanya bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Grindle (1980: 7) lebih lanjut menjelaskan bahwa proses implementasi dimulai ketika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, dan dana telah dialokasikan dan didistribusikan untuk memastikan pencapaian target.

Lane mengusulkan pembagian konsep implementasi menjadi dua komponen berbeda. Bagian awal mencirikan implementasi sebagai fungsi yang dilambangkan dengan F, yang mencakup niat, keluaran, dan hasil. Pada dasarnya, implementasi adalah suatu proses yang mencakup pencapaian tujuan dan sasaran, serta menghasilkan hasil yang nyata dan konsekuensi selanjutnya yang timbul dari hasil tersebut. Komponen kedua dari konsep implementasi digambarkan sebagai persamaan fungsional disebut juga F yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebijakan, pembentuk, pelaksana, pemrakarsa, dan waktu. Fokus utama kedua fungsi tersebut adalah pada kebijakan itu sendiri, yang diikuti dengan hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh pelaksana dalam jangka waktu tertentu (Sabatier, 1986: 21-48).

Di bidang pendidikan, proses implementasi kebijakan tidak hanya mencakup tindakan badan administratif yang bertanggung jawab melaksanakan program dan memastikan kepatuhan di antara kelompok sasaran, namun juga mencakup serangkaian faktor hukum, politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam program pendidikan (Hasbullah, 2015: 92). Implementasi kebijakan pendidikan merupakan upaya untuk menerjemahkan rumusan kebijakan ke dalam penerapan praktis, karena manfaat kebijakan pendidikan yang dirancang dengan baik hanya dapat diwujudkan melalui implementasi yang efektif (Nurhakim 2023). Sebaliknya, formulasi kebijakan pendidikan yang paling sederhana sekalipun dapat memberikan manfaat yang signifikan bila berhasil diimplementasikan. (Nurhakim, Yahya, and Rasyid 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan adalah proses penyelesaian masalah dalam pendidikan untuk mencapai tujuan kebijakan melalui suatu mekanisme yang sesuai dengan prosedur serta hasil kebijakan yang bisa dinikmati oleh semua pemangku kepentingan pendidikan. Ini bertujuan untuk

meningkatkan kepatuhan dan ketertiban administrasi. Pelaksanaan kebijakan pendidikan merupakan aktivitas penting setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa pelaksanaan, kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan publik secara umum (Iwan Satibi, 2010: 25).

Pelaksanaan kebijakan pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting, bahkan lebih krusial dibandingkan dengan perumusan kebijakan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena implementasi berfungsi sebagai jembatan antara perumusan kebijakan dan hasil yang diinginkan. Menurut Anderson (2006), terdapat empat komponen dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan: 1) siapa yang melaksanakan kebijakan tersebut, 2) proses administrasi, 3) tingkat kepatuhan yang diharapkan, dan 4) dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut (Abdul Wahab, Solichin; 2004).

Pendekatan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari berbagai perspektif atau pendekatan. Salah satu pendekatan yang dikenal adalah pendekatan masalah implementasi yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10). Edwards III mengajukan pendekatan ini dengan mengajukan dua pertanyaan utama: (1) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (2) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, empat faktor utama yang menentukan keberhasilan proses implementasi dirumuskan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi, termasuk alur kerja birokrasi. Keempat faktor ini menjadi kriteria penting dalam pelaksanaan kebijakan.

Beberapa pendekatan yang biasa digunakan oleh para analis dalam mengimplementasikan kebijakan adalah pendekatan Top-down dan Bottom-up (Wibawa, 1994; Feis Imronah, 2009). Pendekatan top-down adalah pendekatan di mana kebijakan yang abstrak atau makro diturunkan menjadi tindakan konkret atau mikro. Dalam pendekatan ini, peran pemerintah sangat besar, dengan asumsi bahwa para pembuat keputusan adalah aktor kunci dalam keberhasilan implementasi. Kebijakan yang bersifat top-down biasanya berkaitan dengan isu-isu strategis dan keamanan nasional, seperti kebijakan anti-terorisme, radikalisme, kurikulum pendidikan, dan pembiayaan pendidikan nasional (Nurhakim 2022).

Pendekatan bottom-up dari bawah (masyarakat). Pendekatan ini didasarkan pada proses politik yang diawali dengan komunikasi keinginan, aspirasi, atau dukungan dari masyarakat. Penerapan kebijakan melalui pendekatan ini mendorong warga negara untuk mengungkapkan keinginan dan permasalahan yang mereka hadapi, serta mengatasi isu-isu non-strategis, biasanya yang tidak terkait langsung dengan keamanan nasional, seperti: Hal ini juga memberikan peluang untuk menyelesaikan masalah. B. Kebijakan preventif dan kualitas varietas padi yang tidak penting pada suatu wilayah atau kawasan tertentu, pengembangan ekonomi nelayan, dan lain-lain. Pilihan paling efektif dalam implementasi

kebijakan adalah dengan menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up secara partisipatif, menciptakan kombinasi (mixing) yang melibatkan kedua pendekatan tersebut..

Strategi Implementasi Kebijakan Pendidikan

Pengelolaan pendidikan yang bersifat desentralisasi di Indonesia memungkinkan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang melibatkan unsur pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Dalam proses pendidikan, diberikan kesempatan dan wewenang kepada pemangku kepentingan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memajukan lembaga pendidikan (sekolah). Praktik kebijakan pendidikan ini dituangkan dalam pengelolaan yang dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (Athiyah, 2019). Dalam sistem MBS, wewenang pengelolaan sekolah diserahkan kepada sekolah dan pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, perlu diketahui strategi pengelolaan pendidikan di sekolah secara merata meskipun konsep pengelolaannya bersifat desentralisasi. Tahapannya adalah sebagai berikut:

a. Tahap Sosialisasi

Tahapan sosialisasi merupakan langkah penting karena diperlukan penyebaran kebijakan yang merata ke seluruh daerah di Indonesia. Penyebaran informasi ini dapat dilakukan secara online maupun offline. Tantangan dalam tahapan sosialisasi ini adalah masyarakat yang sering kali sulit menerima perubahan, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan perubahan kebijakan, diperlukan pertimbangan yang memperhatikan aspek tujuan, manusia, lingkungan, proses, hasil, dan kebiasaan.

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila informasi tersebut jelas bagi para pelaksana. Ini mencakup proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya mencakup empat komponen: jumlah dan kualitas staf yang memadai, informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas atau tanggung jawab, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana mencerminkan komitmen mereka terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur alur pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan..

b. Tahap piloting

Tahapan piloting ini bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari uji coba kebijakan sehingga diperlukan model uji coba. Model uji coba ini harus memenuhi syarat yaitu akseptabilitas, akuntabilitas, replikabilitas dan sustainabilitas.

c. Tahap Diseminasi

Tahapan diseminasi merupakan langkah penyebaran kebijakan secara luas. Perlu diperhatikan bahwa tahap ini memerlukan banyak fasilitas dan anggaran yang besar. Untuk memperlancar implementasi kebijakan, diseminasi harus dilakukan dengan baik. Ada empat syarat dalam pengelolaan diseminasi kebijakan: (1) adanya

respek dari anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan pentingnya mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang secara moral; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima serta melaksanakan kebijakan terwujud ketika kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4) awalnya suatu kebijakan mungkin dianggap kontroversial, tetapi lama-kelamaan akan diterima.

Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu: (1) kepatuhan implementor dalam mengikuti perintah dari atasan, dan (2) kemampuan implementor dalam mengambil keputusan pribadi yang tepat dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dinilai berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Dari perspektif proses, program pemerintah dianggap berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program, yang mencakup cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran, dan manfaat program. Sementara dari perspektif hasil, program dinilai berhasil jika membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dari segi proses, tetapi bisa jadi gagal dari segi dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Model Implementasi Kebijakan Pendidikan

Model implementasi kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai konsep, diagram, grafik, atau persamaan matematika yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi elemen-elemen dalam situasi masalah pendidikan. Tujuannya adalah untuk merekomendasikan serangkaian tindakan guna memecahkan masalah yang kontroversial dan menarik perhatian publik. Model merupakan representasi ideal dari situasi dunia nyata, yang menyederhanakan realitas yang diwakilinya (Asmad Hanisy, 2013). Fungsi utama model adalah untuk mempermudah penjelasan suatu konsep. Dalam beberapa kasus, model bisa didasarkan pada teori dan digunakan untuk menguji atau menjelaskan hipotesis sebagai bagian dari proses perumusan teori. Untuk menjelaskan pentingnya partisipasi orang tua siswa dan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, penggunaan model konsep dapat memudahkan pemahaman.

Dalam aspek pelaksanaan, terdapat dua model implementasi kebijakan yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif (Baedhowi, 2004: 47). Model linier dalam implementasi kebijakan menekankan bahwa fase pengambilan keputusan adalah yang paling penting, sementara fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian karena dianggap sebagai tanggung jawab pihak lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal, biasanya pihak manajemen yang disalahkan karena dianggap kurang memiliki komitmen, sehingga diperlukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.

A. Tahapan Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebaikan menakhlikkan serupa kiat yang sangat kegandrungan dan rumit. Eugene Bardach (2006) menumpahkan bahwa cukup menggerakkan kesibukana dan kebaikan yang datang kuala di permulaan kertas. Lebih gaib lagi merumuskannya bagian dalam ujaran-ujaran dan semboyan yang terbit membuang perbanyak getah perca pengurus dan pengikut mereka, dan lebih gaib lagi menjelang menyamakan kebaikan termuat pakai sifat yang melampiaskan semua pihak, terhitung pelanggan (Leo Agustino, 2014).

Pernyataan ini memberitahukan bahwa praktik kebaikan tutorial adalah sikap bagian dalam kiat kebaikan yang mematok apakah kebaikan termuat relevan pakai guna pemegang guna tutorial dan bisa dikabulkan oleh masyarakat. Dalam surah ini, meskipun strata dan formulasi kebaikan dilakukan pakai baik, jika taraf implementasinya tidak dioptimalkan, berwai resultan kebaikan termuat tidak akan jelas. Pada taraf penjumlahan kebaikan, seringkali tersua bahwa formulasi dan praktik kebaikan tidak selaras. Jika demikian, praktik kebaikan termuat tidak seia sekata pakai harapan.

Implementasi kebaikan adalah taraf rekayasa yang merembet aliansi yang kegandrungan pakai mengamati dua surah utama: a) formulasi objek kebaikan harus jelas, terhitung instansi sasaran, sumbangan yang harus dimainkan, dan sifat pelaksanaannya; dan b) subsidi inayat yang proporsional, karena tanpa inayat kebaikan tidak akan pertautan terealisasi (Jusdin dan Rusdiyanto, 2013). Implementasi kebaikan tutorial mengerjakan ajaran Charles O. Jones bagian dalam Gaffar (1997) yang mempunyai tiga strata utama, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

B. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan dalam mencapai tujuannya didasarkan pada tiga aspek: 1) tingkat kepatuhan birokrasi pendidikan terhadap tingkat birokrasi yang lebih tinggi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, 2) kelancaran rutinitas tanpa adanya masalah, dan 3) pelaksanaan serta dampak (manfaat) yang diharapkan dari semua program pendidikan yang ada (Ripley dan Franklin dalam Joko Widodo, 2001: 12). Selain itu, variabel lain yang berperan adalah dorongan dan paksaan dari birokrasi pendidikan tingkat pusat, yang ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas. Semakin sah kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah pusat di mata daerah, semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya (Jusdin dan Rusdiyanto, 2013).

Menurut Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310), untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan publik, perlu memperhatikan variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan. Pemilihan kebijakan yang tepat memungkinkan masyarakat berpartisipasi dan memberikan kontribusi optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Setelah kebijakan terpilih, diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi terdapat kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan untuk pelayanan publik. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi, tergantung apakah bersifat positif atau negatif. Lingkungan yang positif terhadap suatu kebijakan akan memberikan dukungan yang mengarah pada kesuksesan implementasi kebijakan, sementara lingkungan yang negatif dapat menyebabkan benturan sikap, mengancam keberhasilan implementasi. Lebih dari tiga

aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

C. Faktor yang Memengaruhi Kebijakan Pendidikan

Dalam implementasi kebijakan, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Implementasi yang efektif akan menghasilkan hasil yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan tersebut. Menurut Arif Rohman, terdapat tiga faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Rumusan Kebijakan: Faktor ini berkaitan dengan seberapa jelas kalimat dalam kebijakan tersebut, apakah sasarannya tepat, mudah dipahami, tidak ambigu, dan realistis untuk dilaksanakan. Kualitas rumusan kebijakan sangat penting dalam menentukan seberapa efektif kebijakan tersebut bisa diterapkan. Personil Pelaksana: Faktor ini melibatkan tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Latar belakang budaya, bahasa, dan ideologi politik juga berpengaruh signifikan terhadap cara kerja mereka dalam melaksanakan kebijakan secara kolektif. Sistem Organisasi Pelaksana: Faktor ini mencakup struktur jaringan, hirarki kewenangan, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan, aturan organisasi, target pada setiap tahap, serta metode monitoring dan evaluasi yang digunakan. Sistem organisasi yang baik akan mendukung pelaksanaan kebijakan secara efisien dan efektif.

Dengan mempertimbangkan ketiga faktor tersebut—rumusan kebijakan yang jelas, personil pelaksana yang kompeten, dan sistem organisasi yang terstruktur dengan baik—implementasi kebijakan diharapkan dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Sabatier dan Mazmanian, seperti yang dikutip oleh Sudiyono dan Mada Sutapa, ada lima faktor pendukung agar implementasi kebijakan dapat berlangsung secara optimal: Dasar Teori: Program harus didasarkan pada kajian teori yang relevan dengan perubahan perilaku kelompok sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan. Teori sebab-akibat menjadi landasan penting, dengan fokus pada hubungan antara pencapaian dan hasil yang diharapkan, serta cara pelaksanaan kebijakan oleh kelompok sasaran. Ketepatan Hukum: Undang-undang atau peraturan harus jelas dan tidak ambigu. Sasaran kebijakan harus ditetapkan dengan tepat, baik secara internal maupun dalam konteks program keseluruhan. Kemampuan Pelaku Kebijakan: Para pelaku kebijakan harus memiliki keterampilan manajerial, politik, dan komitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai. Pemimpin dan perumus kebijakan perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan dukungan dan komitmen terhadap tujuan Undang-undang.

Dukungan Stakeholder: Program harus didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemilih, perumus undang-undang, dan pengadilan yang mendukung. Prioritas dan Urgensi: Prioritas umum dari sasaran perundang-undangan tidak boleh direduksi oleh faktor waktu atau perubahan situasi sosial-ekonomi yang mendesak.

Implementasi kebijakan harus didasarkan pada teori perundang-undangan dan mendapatkan dukungan publik.

Menurut Winarno dan Dunn, implementasi kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan, melalui lima tahapan: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sementara menurut Devine, implementasi kebijakan pendidikan melibatkan empat dimensi utama: normatif, struktural, konsituentif, dan teknis. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan meliputi: ketiadaan hambatan eksternal, ketersediaan sumber daya yang memadai, kebijakan pendidikan yang berkualitas, hubungan ketergantungan minimal, adanya kesepahaman dan kesepakatan terhadap tujuan pendidikan, tugas yang ditetapkan dengan urutan yang tepat, komunikasi dan koordinasi yang lancar, serta dukungan dari otoritas terkait. Namun, implementasi kebijakan tidak selalu berjalan lancar. Faktor-faktor seperti kompleksitas organisasi dan dinamika politik juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Perlu adanya koordinasi yang efektif antarorganisasi dan penanganan yang tepat terhadap aspek politik untuk meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan

4. Kesimpulan

Implementasi kebijakan tidak hanya merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan, tetapi juga merupakan langkah kritis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Tanpa implementasi yang efektif, suatu kebijakan hanya akan menjadi wacana tanpa dampak nyata pada masyarakat atau sektor yang dituju. Oleh karena itu, proses implementasi harus memperhatikan integrasi antara berbagai sistem yang terlibat, mulai dari tingkat pusat hingga pelaksanaan di lapangan. Terutama dalam konteks pendidikan, implementasi kebijakan harus dihindari dari masalah seperti kehilangan arah dari perencanaan pusat dan hambatan teknis yang mungkin muncul di lapangan. Kehadiran masalah-masalah ini dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan dan mengurangi dampak positif yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Dengan memperhatikan integrasi sistem dan mengatasi kendala-kendala teknis, implementasi kebijakan pendidikan dapat menjadi lebih efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Referensi

- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 Universitas Negeri Makassar
- Arwildayanto, Arifin Sukung, Warni Tune Sumar. 2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: Cendekia Press.
- Baedhowi. 2004. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta*, Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.

- Goggin, Malcolm L et al. 1990. *Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation*, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Hanisy, Asmad. 2015. *Konsep Dasar Analisis Kebijakan*. Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan.
- Hasbullah, Muhammad. 2015. *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Imronah. 2009. *Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Neliti.com
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*, St. Martin Press, New York.
- Nurhakim, Haditsa Qur'ani. 2022. "Hak Asasi Anak Perspektif Islam." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 2(1):66–80.
- Nurhakim, Haditsa Qur'ani. 2023. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah." *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 22(2):303–13.
- Nurhakim, Haditsa Qur'ani, Wildan Yahya, and A. Mujahid Rasyid. 2021. "TAHFIDZUL QUR'AN LEARNING MANAGEMENT AT PPI 153 AL-FIRDAUS." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 10(2):275–84.
- Oktavia, Linda Sari, Nurhidayati Nurhidayati, Nurhizrah Gistituati. 2021. *Kebijakan Pendidikan: Kerangka, Proses Dan Strategi Jrti*. Jurnal Riset Tindakan Indonesia Vol. 6, No. 1, Universitas Negeri Padang.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Sabatier, Paul. 1986. "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48.
- Satibi, Iwan. 2011. *Manajemen Publik dalam Perspektif Teoritik dan Empirik*. Bandung: Unpas Press.
- Solichin, Mujianto. 2015. *Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. Religi: Jurnal Studi Islam*. Volume 6, Nomor 2, Oktober. Universitas Pesantren Tinggi Darul UlumJombang.
- Wahab Abdul, Solichin. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.